

ABSTRAK

Harapan kuat mewujudkan Sambas yang berkeadilan, maju dan sejahtera, adalah cita-cita yang telah tertanam lama sejak masa Kesultanan Sambas, hingga sekarang ini dalam bentuk Pemerintahan Kabupaten Sambas. Upaya mewujudkan harapan itu, tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang terbilang sangat menguji adalah terciptanya interaksi kelimanya antar etnis tahun 1999 lalu, yaitu melibatkan etnis Melayu Sambas sebagai masyarakat lokal dengan etnis Madura sebagai masyarakat pendatang. Rekonstruksi budaya hukum diperlukan dalam rangka memulihkan kehidupan etnis Madura dan masyarakat Melayu Sambas untuk dapat hidup berdampingan kembali secara ‘damai’ dalam wilayah Kabupaten Sambas.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis budaya hukum masyarakat Madura dan Melayu Sambas dalam memahami simbol-simbol yang dimiliki masing-masing etnis; (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi konflik antar etnis dan bagaimana pemulihannya; (3) Untuk menganalisis konstruksi baru budaya hukum masyarakat yang dikembangkan etnis Madura dan etnis Melayu Sambas dalam pemulihan konflik yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan socio legal research. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif diarahkan pada pemaparan gejala secara deskriptif, sedangkan analisis kualitatif dilakukan secara induktif-deduktif. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini adalah sikap etnosentris dan eksklusif etnis Madura, menjadikan tatanan interaksi sosial dengan etnis Melayu Sambas secara destruktif, berupa konflik sosial yang berakhir dengan terusirnya etnis Madura dari Kabupaten Sambas. Konflik sosial terjadi adalah bukti kegagalan pemerintah dalam proses pembauran antar suku dan supremasi hukum. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga konflik antar etnis antara etnis Madura dengan Melayu Sambas terjadi. Selain faktor perbedaan asal usul, nilai-nilai budaya sebagai dasar perbedaannya, juga dikarenakan karakter dan etnosentris dan eksklusivismenya etnis Madura sebagai pemicu konflik, serta lemahnya supremasi hukum sebagai faktor yang semakin memperlebar jarak kehidupan diantara kedua etnis. Atas persoalan itu maka sebagai rekonstruksi baru budaya hukum, bahwa etnis Madura perlu melakukan reposisi nilai budaya dalam rangka adaptasi/penyesuaian diri, sehingga dapat diterima kembali di Kabupaten Sambas, karena mampu beradaptasi secara sosial dan menyesuaikan diri—*well adjusted*, dalam bentuk Pendidikan multikulturalisme untuk Pendidikan dasar dan menengah, pondok pesantren, dan perkawinan antara orang Madura, Dayak, Sambas.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Konflik Etnis; Madura dan Madura; Melayu Sambas; Rekonstruksi

Abstract

A strong hope to realize a just, developed, and prosperous Sambas has long become the dream that deeply rooted from the era of Sambas Sultanate to the era of Sambas Regency Governance. There are so many challenges to realize the big dream. One of the biggest challenges was the dark relationship of cross-ethnic interaction between the Melayu Sambas natives and the migrant Madurese. A legal culture reconstruction was needed to recover the cross-ethnic relationship between the Melayu Sambas and the Madurese so that they could live side-by-side peacefully in Sambas Regency.

The objectives of this study are: (1) to analyze the legal culture of the Madurese and the Melayu Sambas in understanding the symbols owned by each of the ethnic group? (2) to analyze factors created the cross-ethnic conflict and how was the recovery? (3) to analyze the new construction of legal cultures developed by the Madurese and the Melayu Sambas during the conflict recovery efforts based on the value of justice.

The research used constructivism paradigm with socio legal research approach. The data used included the primary data obtained through interviews and observations as well as secondary data obtained from document studies. The gathered data was analyzed by using both qualitative and quantitative methods. The quantitative analysis was directed to describe the phenomena descriptively, whereas the qualitative analysis was done inductive-deductively. The technique used to check the reliability of the data is data triangulation method.

The result of the study shows that it was the ethnocentric and exclusiveness of the Madurese that made the social interaction pattern of this ethnic group with the Melayu Sambas became so destructive and formed a social conflict that ended with the expel of the Madurese from Sambas Regency. The social conflict was a proof of the government failure in the diffusion process among ethnic groups as well as in the law supremacy. There were so many factors that caused the cross-ethnic conflict between the Madurese and the Melayu Sambas. Not only the differences of places of origin and cultural values as the core discrepancies, but also the character of ethnocentrism and exclusiveness of the Madurese that triggered the conflict, as well as the weak law supremacy that became the factor to widen the gaps between the two ethnic groups. Therefore, a reconstruction of a new legal culture is needed, that the Madurese has to reposition their cultural values in order to adapt so that they can be re-accepted in Sambas Regency due to their ability to socially adapt and be well adjusted, in the form of multiculturalism education for primary and secondary education, Islamic boarding schools, and marriages between Madurese, Dayak, Sambas people.

Keywords: Legal Culture; Ethnical Conflict; Madurese; Melayu Sambas; Reconstruction